

**BAB II**

**KEPUTUSAN SUDAN MEMBUKA HUBUNGAN DIPLOMATIK**

**DENGAN ISRAEL**

Di bagian ini, peneliti akan mengulas secara komprehensif mengenai situasi dalam negeri Sudan, mencakup kondisi ekonomi dan keamanan setelah tahun 2011. Selain itu, akan dibahas juga bagaimana Israel terlibat dalam politik dan konflik di Sudan, baik melalui hegemoni politik maupun dalam konteks konflik yang terjadi. Bagian terakhir akan menyoroti kronologi atau urutan peristiwa yang mengarah pada pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel, menggambarkan langkah-langkah dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut.

**2.1 Kondisi Internal Sudan**

**2.1.1 Konflik Antara Sudan dengan Sudan Selatan**

Pada tahun 1956, Sudan meraih kemerdekaan dari kekuasaan Inggris dengan dukungan dari Mesir dan Inggris. Peristiwa penting ini menandai peralihan negara tersebut ke pemerintahan yang independen, di mana Sudan menyatakan kedaulatannya dan menjadi negara yang sepenuhnya mandiri. Sudan terletak di Afrika dengan luas sekitar 1.609.344 kilometer persegi dan memiliki populasi sekitar 33 juta jiwa. Mayoritas penduduknya di Sudan terbagi menjadi beberapa kelompok yakni yang berasal dari Afrika berkulit gelap, berasal dari Arab serta adanya kelompok etnis campuran yang lebih kecil. Ditinjau dari segi geografis. Sudan memiliki wilayah yang berhadapan langsung dengan negara Libya serta Mesir yang berada di Utara, negara Uganda serta Kongo yang berada di Selatan,

negara Ethiopia yang berada di Timur, dan Republik Afrika tengah serta Chada yang berada di Barat.<sup>35</sup>

**Gambar 2.1 Peta Sudan Utara Tahun 2010**



Sumber : Relief Web<sup>36</sup>

Sudan dibagi menjadi dua wilayah utama berdasarkan afiliasi agama dan etnis: bagian utara dan selatan. Wilayah utara didominasi oleh masyarakat keturunan Arab dan menganut agama Islam, sedangkan wilayah selatan didominasi oleh masyarakat keturunan Afrika berkulit gelap dan menganut agama Kristen. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua wilayah tersebut menunjukkan perbedaan yang

<sup>35</sup> Aulia Candra Sari, *Pengelolaan Zakat Di Negara Sudan*, ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf 4, no. 2 (2018): 347, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3050>.

<sup>36</sup> Reliefweb, *Sudan: Reference Map (as of 2010)*, Reliefweb, 2010, <https://reliefweb.int/map/sudan/sudan-reference-map-2010>.

signifikan dalam hal agama, gaya hidup, budaya, dan aspek lainnya, dan cenderung beroperasi secara terpisah.<sup>37</sup>

Dalam pemerintahannya Sudan menunjuk perdana Menteri pertama yang bernama Ismail Al Azhari, pada tahun 1954. Dalam menjalankan fungsi politiknya Ismail Al Azhari dihadapkan dengan berbagai masalah yang datang dari lingkup internal. Hal ini disebabkan oleh kondisi negara yang sedang krisis. Sudan dikenal dalam lingkup dunia merupakan negara yang mengalami perekonomian buruk atau dengan kata lain masuk kedalam negeri termiskin yang ada didunia serta mengalami situasi politiknya sering mengalami fluktuasi. Hal ini terjadi dikarenakan, Sudan mempunyai sektor yang dapat meyumbang devisa negara, negara ini dikenal dengan pertanian serta peternakan yang dapat memberikan pemasukan sebanyak 40% untuk Pendapatan Domestik Bruto tahunan Sudan. Akan tetapi, sektor tersebut tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemerintahan pada saat itu.<sup>38</sup>

Untuk meningkatkan upaya pengembangan ekonomi, pemerintah Sudan tidak hanya berfokus pada sektor pertanian dan peternakan, tetapi juga melakukan diversifikasi jenis tanaman. Selain itu, Sudan juga telah berinvestasi dalam industri minyak. Pemerintah Sudan telah mulai mengembangkan program nasional yang lebih luas, mencakup aspek domestik hingga kebijakan luar negeri. Dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi, Sudan juga mulai mengarah pada kerjasama

---

<sup>37</sup> CIA, *CIA Fact Book: Sudan Country Profile*, CIA GOV, 2024, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/sudan/>.

<sup>38</sup> Fao, *Sudan at a Glance*, FAO, 2024, <https://www.fao.org/sudan/fao-in-sudan/sudan-at-a-glance/en/>.

multilateral dengan negara yang ada di dunia, fokus utama dari negara Sudan yaitu melakukan kerjasama dengan negara kawasan MENA.<sup>39</sup>

Sudan menghadapi kondisi yang sangat sulit, baik dalam aspek ekonomi maupun politik. Kondisi ini tidak dapat sepenuhnya diatribusikan kepada Ismail Al Azhari yang merupakan Perdana Menteri pertama Sudan, karena pemerintahan Sudan mengalami pergantian secara terus menerus, bahkan tergolong sering, dalam kurun waktu 32 tahun. Dalam periode ini, terjadi 12 pergantian Perdana Menteri. Pada akhirnya, Sudan dikuasai oleh Presiden Omar Al-Bashir, Presiden tersebut melakukan kudeta militer tanpa adanya kekerasan dan memimpin Sudan selama beberapa tahun ke depan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Omar Al-Bashir, Sudan telah mencapai beberapa kemajuan dalam bidang perekonomian. Salah satu contoh adalah penurunan tingkat inflasi yang dialami Sudan. Di samping itu, Sudan menghadapi perubahan dalam sektor perekonomian yang mengarah positif dan adanya perkembangan dalam segi perluasan bidang infrastruktur serta adanya pengembangan secara lingkup nasional secara keseluruhan. Namun, walaupun pertumbuhan ekonomi terus terjadi, Sudan masih menghadapi beberapa tantangan yang belum terselesaikan. Salah satu contohnya adalah konflik berkelanjutan yang terjadi antara dua negara yaitu Sudan Utara dan Sudan Selatan yang belum

---

<sup>39</sup> International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept., *Sudan: Selected Issues*, International Monetary Fund 2020, no. 73 (2020): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.5089/9781513536743.002>.

terselesaikan dimulai dari Sudan meraih kemerdekaannya, situasi ini terus berlanjut di bawah pemerintahan Presiden Omar Al-Bashir.<sup>40</sup>

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Sudan menghadapi perbedaan yang mencolok antara penduduk Sudan Utara dan Sudan Selatan, termasuk adanya ketidakmiripan dalam segi budaya, etnis serta agama. Secara umum di wilayah utara didominasi dengan kelompok etnis Arab yang sebagian mayoritas penduduknya menganut agama Islam, di wilayah Selatan mayoritas penduduknya yakni memiliki etnis Afrika dan sebagian memeluk agama Kristen. Ketika Sudan menyatakan kemerdekaannya, fungsi perpolitik sebagian besar dipengaruhi oleh etnis Arab yang berasal dari Utara, dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah tersebut seringkali melakukan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara kepada warga yang berada di Selatan dan hal itu terjadi sebelum adanya perjanjian pemisahan kedua wilayah.<sup>41</sup>

Dalam menjalankan perpolitikannya, Sudan yang didominasi oleh suku Arab yang mendominasi di kelompok bagian utara, sering kali enggan mengakui keadilan kepada masyarakat yang berada di Selatan atau kelompok yang didominasi oleh suku Afrika. Misalnya dalam pemecahan wilayah, kelompok utara atau suku Arab mendapatkan bagian yang terbilang lebih produktif di bagian utara, sedangkan bagian wilayah selatan mendapatkan kebalikannya. Sementara dalam pemasukan dari sektor perminyakan yang sebagian besar diperoleh dari wilayah selatan banyak

---

<sup>40</sup> BBC, Omar Al-Bashir: Sudan's Ousted President, BBC NEWS, 2019, <https://www.bbc.com/news/world-africa-16010445>.

<sup>41</sup> J. Brosché, *Ethno-Communal Conflict in Sudan and South Sudan*, 2019, [https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-13-2898-5\\_49#:~:text=Although all parts of Sudan,follow Christianity or animist religions.](https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-13-2898-5_49#:~:text=Although all parts of Sudan,follow Christianity or animist religions.)

disalahgunakan karena cenderung melakukan pengembangan di wilayah utara saja. Hal ini diawali dengan konflik antara kedua wilayah mungkin belum terwujud secara penuh seperti perang lainnya, tetapi hanya sebagai perselisihan antara bagian utara dan selatan. Namun, pada tahun 1971, Joseph Lagu, mantan Presiden Dewan Eksekutif Tinggi Wilayah Otonomi Sudan Selatan, membentuk sebuah Gerakan perlawanan, masyarakat Sudan merespons dengan membentuk gerakan yang disebut *Southern Sudan Liberation Movement (SSLM)*, yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Sudan Selatan.<sup>42</sup>

Perang kedua wilayah yang terus berlanjut sampai dengan tahun 1972, menyebabkan kerugian yang besar tidak hanya dalam sektor ekonomi, tetapi juga dalam jumlah korban jiwa yang tinggi. Sudan Selatan terkena dampaknya secara signifikan, terutama terkait eksploitasi sumber daya alam, seperti minyak, oleh Sudan Utara tanpa memberikan kontribusi pembangunan yang seimbang bagi Sudan Selatan. Selain itu, masyarakat Sudan Selatan juga mengalami perlakuan tidak adil sebagai budak oleh masyarakat Sudan Utara yang mayoritasnya beretnis Arab.<sup>43</sup>

Untuk mengakhiri perang kedua Saudara ini pemerintah Sudan Utara dan *Southern Sudan Liberation Movement (SSLM)* mencapai kesepakatan untuk menandatangani Perjanjian Addis. Dalam perjanjian ini, disepakati bahwa Sudan Selatan akan diberikan status pemerintahan otonom, dengan hak untuk memiliki

---

<sup>42</sup> GlobalSecurity, *Sudan - First Civil War*, GlobalSecurity.org, n.d., <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm>.

<sup>43</sup> samuel Momodu, *First Sudanese Civil War (1955-1972)*, Blackpast, 2020, <https://www.blackpast.org/global-african-history/events-global-african-history/first-sudanese-civil-war-1955-1972/>.

lembaga eksekutif dan legislatif sendiri. Selain itu, Sudan Selatan juga akan terlibat dalam bidang pertahanan, termasuk kepolisian dan militer Sudan. Namun, meskipun ada perjanjian ini, pelaksanaan otonomi tersebut masih diragukan karena hanya berupa janji dan belum ada bukti konkret bahwa hal tersebut akan direalisasikan.<sup>44</sup>

Dapat dibenarkan berdasarkan dengan terbuktinya adanya tekanan dari pemerintah Sudan Utara terhadap Sudan Selatan untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah utara, termasuk upaya pemerintah Sudan dalam mengubah arah perpolitikan Sudan yang berlandaskan dengan keislamisasian. Pada tahun 1983, dibawah pengaruh pemimpin mereka yaitu Jenderal Numeiri, mengalami perubahan yang berkaitan dengan kecenderungan Jenderal Numeiri untuk menjadikan Sudan sebagai negara Islam. Dalam upaya ini, segala bentuk hukum syariat Islam diberlakukan tanpa pengecualian, tanpa memperhatikan perbedaan budaya dan agama di Sudan Selatan.<sup>45</sup>

Tidak hanya itu, ketika Omar Al-Bashir memimpin Sudan, Hukum Syariat Islam menjadi sangat kuat dan diterapkan secara ketat. Kondisi ini sangat tidak diterima oleh masyarakat Sudan Selatan, yang terdiri dari orang Afrika dan Kristen, dan mereka merasa sangat marah dan frustrasi. Seorang tokoh revolusioner, John Garang, membentuk aliansi bersama 3000 pasukan untuk mendirikan *Sudan*

---

<sup>44</sup> Zavira Aulia et al., *Penyelesaian Hukum Terhadap Kasus Sudan Selatan*, Jurnal Universitas Tarumanegara 1 (2021): 713–22, <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/17536>.

<sup>45</sup> Lawrence Rubin Michael Robbins, *Sudan's Government Seems to Be Shifting Away from Islamic Law. Not Everyone Supports These Moves.*, Washington Post, 2020, <https://www.washingtonpost.com/politics/2020/08/27/sudans-government-seems-be-shifting-away-sharia-law-not-everyone-supports-these-moves/>.

*People's Liberation Army* (SPLA), yang kemudian bergabung dengan Sudan *People's Liberation Movement* (SPLM). Langkah ini bertujuan untuk melawan pemerintahan yang dipimpin oleh Bashir. Konflik ini memicu perang saudara yang panjang antara Sudan Utara dan Sudan Selatan, dengan dampak buruk yang signifikan bagi kedua wilayah tersebut.<sup>46</sup>

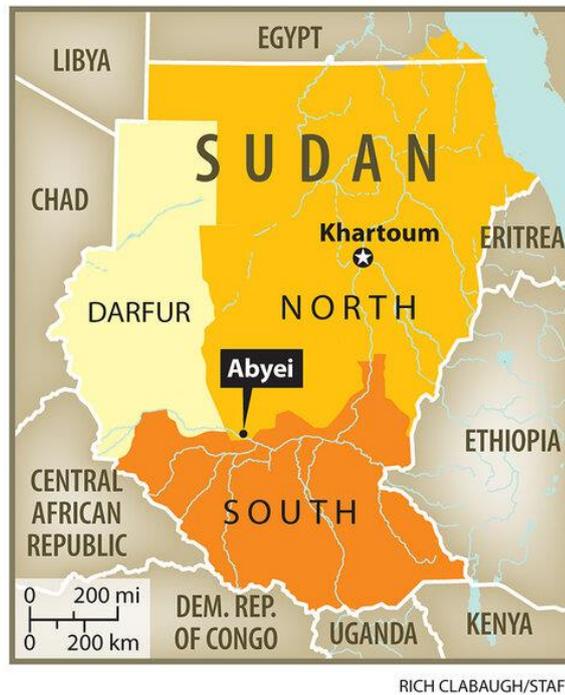
Beberapa tahun kemudian, Perang Saudara mencapai titik terang dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian pada tahun 2005 antara Sudan Utara dan Sudan Selatan. Perjanjian damai yang dikenal sebagai *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dilakukan antara pemerintah Sudan dan *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) untuk menghentikan perang yang berlangsung selama dua dekade. Perjanjian ini juga mencakup penyelenggaraan referendum pada tahun 2011 di Sudan Selatan, yang memungkinkan penduduknya untuk memilih apakah mereka ingin merdeka atau tetap menjadi bagian dari Sudan. Hasilnya menunjukkan bahwa 98,3% penduduk Sudan Selatan mendukung kemerdekaan mereka. Dengan demikian, Sudan Selatan secara resmi memperoleh kemerdekaan dan menjadi negara yang terpisah dari Sudan. Negara baru ini juga diakui secara internasional oleh berbagai lembaga, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> F. H. Setyawan, *Gerakan Separatis Sudan's People Liberation Army (Spla) Di Sudan*, (Universitas Jember, 2015), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66405>.

<sup>47</sup> Zaid Al-Ali, *The Juba Agreement for Peace in Sudan*, International IDEA, 2021, <https://doi.org/https://doi.org/10.31752/idea.2021.12>.

**Gambar 2.2 Peta Sudan dan Sudan Selatan Tahun 2011**



Sumber : *The Christian Science Monitor* Logo<sup>48</sup>

### **2.1.2 Ekonomi Sudan Setelah Konflik**

Setelah dijelaskan bagaimana Sudan Selatan menghadapi keserakahan Sudan Utara dan akhirnya memutuskan untuk merdeka, perpecahan ini tidak seluruhnya menguntungkan bagi Sudan Utara. Ketergantungan Sudan Utara pada sektor minyak, yang menyumbang sekitar 70-80% dari pendapatan domestik bruto (PDB), serta Sudan Selatan yang bergantung pada minyak dengan sekitar 98% PDB, mengakibatkan gangguan dalam keseimbangan ekonomi kedua negara. Menurut laporan dari *International Monetary Fund* (IMF), Sudan mengalami penurunan sekitar 75% dari pendapatan mereka yang berasal dari sektor minyak,

<sup>48</sup> Rebecca Hamilton, “‘Oil-Rich’ Abyei: Time to Update the Shorthand for Sudan’s Flashpoint Border Town?,” *The Christian Science Monitor*, 2010, <https://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2010/1102/Oil-rich-Abyei-Time-to-update-the-shorthand-for-Sudan-s-flashpoint-border-town>.

dan sekitar 5-10% dari sektor ekonomi lainnya, yang setara dengan sekitar 50 miliar Pound Sudan (SDG).<sup>49</sup> Dari segi keuangan, Sudan mengalami penurunan sebesar 12 miliar Sudanese Pound (SDG) dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Penurunan ini terjadi karena kehilangan sebagian pendapatan dari sektor minyak dan juga karena putusnya hubungan dengan penduduk yang kini menjadi bagian dari Sudan Selatan. Di sisi lain, dari perspektif faktor eksternal, Sudan mengalami kerugian sekitar 6,6 miliar SDG karena penurunan ekspor minyak dari Sudan Utara.<sup>50</sup>

Hal tersebut dapat terjadi karena 2/3 dari industri minyak Sudan di kawasan Sudan Selatan serta untuk mengalirkan pipa ekspor adanya di Sudan Utara. Setelah adanya pemisahan wilayah kedua negara, terdapat beberapa perusahaan yang masih melakukan operasionalnya di wilayah selatan seperti perusahaan Petrodar, *Greater Nile Petroleum Operating Company* (GNPOC), serta *White Nile Petroleum Operating Company* (WNPOC). Sedangkan di wilayah utara terdapat 2 perusahaan yang masih beroperasi yakni GNPOC serta Petro Energy. Kedua negara tersebut secara harfiah masih membutuhkan satu sama lainnya, karena dua pertiga kilang minyak yang berada di Sudan Selatan harus melakukan ekspor melalui pipa yang ada di wilayah Utara untuk dapat melintasi Pelabuhan Sudan.<sup>51</sup> Sudan Utara dan Sudan Selatan melakukan perundingan untuk menyelesaikan masalah tersebut, terutama terkait harga penggunaan pipa minyak. Salah satu aspek yang memicu

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Sabna Mohamed Abbass Ali, *Post-Secession Sudan and South Sudan: A Comparative Study of Economic Performance, Export Diversification, and Institutions*, *Journal of Asian and African Studies* 58, no. 6 (2022): 864-887., <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/00219096221076106>.

<sup>51</sup> Crisis Group, *Oil or Nothing: Dealing with South Sudan's Bleeding Finances*, Crisis Group, 2021, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/305-oil-or-nothing-dealing-south-sudans-bleeding-finances>.

konflik adalah perbedaan dalam penentuan harga penggunaan pipa minyak, di mana Sudan Selatan menawarkan di angka US\$1, sementara Sudan Utara menginginkan dana yang lebih tinggi, yaitu US\$32.<sup>52</sup>

Sejak perpecahan Sudan Utara dan Sudan Selatan, Sudan telah jatuh ke dalam daftar negara miskin dan terus memburuk. Inflasi terus meningkat, stok bahan makanan menipis karena impor yang terbatas akibat krisis mata uang, dan pendapatan dari ekspor serta daya beli masyarakat menurun. Hal ini menyebabkan Sudan masih terbelenggu dalam inflasi yang terus dan menerus, serta menimbulkan berbagai masalah lainnya yang memburukkan situasi ekonomi Sudan.<sup>53</sup>

Pada tahun 2018, inflasi terus meningkat dan dampaknya mulai terasa oleh masyarakat dengan semakin memburuknya kondisi ekonomi. Harga untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat Sudan mengalami kenaikan dua kali lipat, sementara pasokan sumber energi sangat terbatas. Sudan juga mengalami masa darurat dalam bidang mata uang hal ini disebabkan karena pemerintah terpaksa mencetak uang untuk menutup kerugian anggaran dalam lingkup besar hal tersebut digunakan sebagian besar untuk membayar biaya bahan bakar.<sup>54</sup> Dampaknya adalah meningkatnya inflasi hingga mencapai 230% dan depresiasi nilai mata uang Sudan terhadap mata uang asing lainnya. Pada saat itu, situasinya seperti tidak dapat diprediksi oleh setiap masyarakat karena dapat berubah setiap waktu. Masyarakat

---

<sup>52</sup> Voa News, *Oil Transit Fee Obstacle to Sudan Talks*, Voa News, n.d., <https://www.voanews.com/a/oiltransitfees/667157.html>.

<sup>53</sup> Ahmad Fuadi Tanjung, Raju Adha, dkk., *Analisis Dampak Konflik Sudan Terhadap Perekonomian Dan Mahasiswa Indonesia Yang Beasiswa Di Sudan*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 3091–3101, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8242>.

<sup>54</sup> Associated Press, *Sudan to Tackle Fuel Subsidies as Economy Hangs on the Edge*, VOA, 2020, [https://www.voanews.com/a/africa\\_sudan-tackle-fuel-subsidies-economy-hangs-edge/6183359.html](https://www.voanews.com/a/africa_sudan-tackle-fuel-subsidies-economy-hangs-edge/6183359.html).

berebut antrian di pompa bensin dan ATM, dan terdapat sebagian mesin ATM yang tidak dapat dioperasikan karena efek dari kehabisan uang sehingga banyak dari masyarakat tidak dapat mengambil uang mereka yang ada di ATM tersebut dan masyarakat bingung untuk mengambil gaji mereka.<sup>55</sup>

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Presiden Omar Al-Bashir mengambil langkah-langkah kebijakan, seperti menghapus subsidi bahan bakar dan menerapkan kebijakan lainnya, untuk mencegah Sudan dari kehancuran akibat krisis ekonomi yang terus berlanjut. Tingkat penderitaan yang sangat parah ini mendorong masyarakat Sudan untuk melakukan demonstrasi dan protes sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintah Sudan.<sup>56</sup>

Pada 19 Desember 2018, di kota Atbara, masyarakat Sudan melakukan aksi unjuk rasa untuk pertama kalinya, yang cepat menyebar ke seluruh negeri termasuk ibu kota, Khartoum, dalam waktu kurang dari seminggu. Demonstrasi tersebut menyebabkan banyak korban jiwa, dan pemerintah merespons dengan membatasi akses telekomunikasi untuk mencegah penyebaran informasi melalui media sosial. Akhirnya, hasil dari demonstrasi ini adalah pengunduran diri Omar Al-Bashir dari jabatan Presiden setelah memerintah selama 30 tahun.<sup>57</sup>

Meskipun berhasil dalam mencapai salah satu tujuannya dengan menggulingkan presiden yang berkuasa, Sudan masih mengalami pemulihan ekonomi yang lambat hingga tahun 2021. Dalam situasi ini, Sudan tetap

---

<sup>55</sup> Rizki Akbar Hasan, *Krisis Ekonomi Sudan: Mesin ATM Tak Keluarkan Uang, Roti Dan Kacang Mahal*, liputan 6, 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/3867490/krisis-ekonomi-sudan-mesin-atm-tak-keluarkan-uang-roti-dan-kacang-mahal>.

<sup>56</sup> Michelle Gavin, *President Bashir Facing Pressure From Protests in Sudan*, Council on Foreign Relations, 2019, <https://www.cfr.org/blog/president-bashir-facing-pressure-protests-sudan>.

<sup>57</sup> Ibid.

membutuhkan bantuan dari negara-negara lain untuk membantu memperbaiki kondisinya.<sup>58</sup> Namun, situasinya tidak bisa berubah karena Sudan masih dianggap sebagai negara yang mendukung terorisme oleh Amerika Serikat. Dalam cakupan ini masalah besar bagi Sudan karena hal ini menghambat mereka untuk dapat menerima bantuan yang berasal dari negara lain yang menjadi rekan dekat dengan Amerika Serikat dan negara Amerika Serikat itu sendiri. Tidak sampai disitu, Sudan mendapatkan terus menerus kritik oleh masyarakat Internasional karena kesalahan Sudan dalam hal ini mengenai Kejahatan bidang kemanusiaan serta kejahatan lainnya dan sedang terjadi di negara Sudan itu sendiri.<sup>59</sup>

### **2.1.3 Keamanan Sudan Setelah Konflik**

Jika dilihat berdasarkan pemaparan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, yang dirasakan Sudan yang mengalami kerugian atas kehilangan kilang minyak yang merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Sudan. Hal tersebut juga tidak lepas dengan keadaan keamanan yang belum sepenuhnya dikatakan kondusif setelah adanya referendum yang dilakukan oleh kedua negara. Setelah Sudan Selatan merdeka melalui keputusan mereka sendiri yang terjadi pada tahun 2011 yang membuat mereka menjadi negara yang berdaulat, setelah mereka mendapatkan kemerdekaannya sendiri perselisihan antara kedua wilayah tersebut yaitu Sudan Utara dan Sudan selatan terus berlanjut. Salah satu masalah utamanya

---

<sup>58</sup> Farouk Kamabreesi, *To Save Its Economy, Sudan Needs Civilian Rule*, ALJAZEERA, 2022, <https://www.aljazeera.com/opinions/2022/10/25/to-save-its-economy-sudan-needs-civilian-rule>.

<sup>59</sup> Nicholas Steinhauser, Gabriele, Bariyo, *Israel-Sudan Deal: Sudan Removed From U.S. Terrorism List*, Well Street Journal, 2020, <https://www.wsj.com/articles/israel-sudan-deal-what-does-the-pact-mean-and-why-now-11603483853>.

adalah tentang pipa minyak dan bagaimana sumber daya alam dibagi antara keduanya. Ada beberapa konflik yang muncul di Sudan setelah itu:

#### **A. Perselisihan Mengenai Biaya Transit Minyak**

Sudan menerima atas kemerdekaan Sudan Selatan, tetapi sejatinya Sudan enggan mendukungnya dalam konteks politik. Alasannya adalah karena Sudan kehilangan sebagian wilayahnya dan hak atas sumber daya seperti ladang minyak yang berada di Sudan Selatan, yang mengakibatkan Sudan terbatas secara geografis. Selain itu, status Sudan Selatan sebagai negara yang terkurung daratan juga menjadi masalah. Konflik muncul terkait biaya transit untuk pengiriman minyak melalui pipa dari Port Sudan ke Sudan Selatan.

Sudan Selatan telah setuju untuk membayar biaya sebesar US\$ 10 per barel minyak yang dihasilkan di wilayah Upper Nile, dan US\$ 11 per barel untuk minyak yang diproduksi di Unity. Biaya-biaya ini dikenakan untuk pengiriman minyak ke Port Sudan guna diekspor. Selain itu, Sudan Selatan juga memberikan kontribusi kepada *Transitional Financial Assistance* (TFA) untuk menutupi biaya transportasi minyak dari Sudan Selatan.<sup>60</sup>

Pemanfaatan pada jalur minyak Sudan Utara kepada Sudan Selatan menyebabkan ketegangan kedua belah pihak, dengan tuduhan saling dilontarkan. Menurut Pagam Anum, pemimpin negosiator Sudan Selatan, Sudan diduga telah mengambil minyak yang seharusnya dijual keluar oleh Sudan Selatan senilai US\$ 815 juta. Presiden Omar-al-Bashir membantah tuduhan ini. Meskipun demikian,

---

<sup>60</sup> SudanTribune, *Juba, Khartoum to Discuss Transitional Financial Arrangements: Official*, SudanTribune, 2022, <https://sudantribune.com/article258735/>.

Sudan tetap bertahan pada keputusannya untuk mengambil 23% dari produksi minyak Sudan Selatan sebagai pengganti biaya transit yang belum disepakati. Setelah pemisahan wilayah, Sudan kehilangan kontrol atas sekitar dua pertiga kilang minyaknya yang kini berada di Sudan Selatan.<sup>61</sup>

Untuk mengimbangi penurunan pendapatan dari sektor minyak, Sudan mengajukan permintaan biaya yang lebih tinggi kepada Sudan Selatan untuk penggunaan di Port Sudan, biaya untuk setiap barel minyak adalah US\$ 32. Ini termasuk biaya transit, transportasi, proses, dan penggunaan fasilitas pelabuhan. Konflik dalam sektor minyak yang muncul setelah *referendum* disebabkan oleh faktor-faktor ini. Dengan kata lain, kebutuhan Sudan Selatan akan Port Sudan menjadi penting karena Sudan Selatan merupakan negara terkurung daratan atau bisa juga disebut sebagai *landlocked country*.<sup>62</sup>

### **B. Perebutan Wilayah Antara Sudan dengan Sudan Selatan**

Setelah konflik di Darfur, banyak penduduk Sudan menjadi pengungsi. Di samping itu, stabilitas politik di Sudan telah terganggu hal ini disebabkan oleh pemimpin mereka yang tidak pernah tergantikan dalam kurun waktu 30 tahun hingga pada tahun 2019, hal tersebut terjadi karena didasari dengan adanya pergantian dari pemerintahan yang dipegang oleh sipil ke militer. Ketidakpuasan terhadap pemerintah Sudan juga meningkat karena kondisi perekonomian yang semakin memburuk. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang menjadi

---

<sup>61</sup> Putri Cahyati, *Analisis Konflik Sudan Dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan Dari Sudan*, *Journal of International Relations* 3, no. 4 (2017): 84–95, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>.

<sup>62</sup> Anne W. Kamau and Witney Schneidman, *South Sudan: Resolving the Oil Dispute*, Brookings, 2012, <https://www.brookings.edu/articles/south-sudan-resolving-the-oil-dispute/>.

pengungsi internal / *internally displaced persons* di Sudan adalah yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain, mencapai 3 juta penduduk. Dari total 401.199 orang pengungsi, hanya sekitar 15.000 orang yang berhasil kembali ke rumah mereka, sementara angka pencari perlindungan dari Sudan tergolong menunjukkan angka yang besar, mencapai sekitar 9.040 orang.<sup>63</sup>

Setelah kemerdekaan Sudan Selatan, Sudan menghadapi sejumlah masalah, termasuk di kota Abyei, wilayah Nil Biru, dan Kordofan Selatan. Sebelum kemerdekaan Sudan Selatan, banyak kelompok pemberontakan yang aktif di sana, termasuk gerakan SPLM/A. Kondisi perbatasan antara Sudan dan Sudan Selatan kian memburuk bahkan setelah perjanjian CPA. Kedua belah pihak tersebut memfitnah satu sama lainnya, Sudan menyalahkan kepada Sudan Selatan atas dasar Sudan Selatan membantu Gerakan pemberontakan yang ada di lingkup perbatasan, sedangkan pihak Selatan menyalahkan Sudan Utara atas dasar serangan udara di wilayah perbatasan.

Semuanya dimulai dengan tindakan destruktif, yang berarti tindakan yang menyebabkan kerusakan. Jauh dari Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaan, SPLM/A mendirikan pos militer di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Setelah kesepakatan pemisahan kedua wilayah mengakibatkan kemerdekaan bagi Sudan Selatan, Sudan memberikan tugas kepada SPLM/A untuk meninggalkan wilayah tersebut dan menyerahkan senjata mereka pada bulan Juni 2011.<sup>64</sup> Kehadiran isu pemaksaan tersebut memancing adanya keributan yang dipersenjatai di Kadugli,

---

<sup>63</sup> Putri Cahyani, *Op. Cit.*,

<sup>64</sup> Human Rights Watch, *Under Siege - Indiscriminate Bombing and Abuses in Sudan's Southern Kordofan and Blue Nile States*, 2013, <http://www.hrw.org/reports/2012/12/11/under-siege>.

pusat Kordofan Selatan, antara SPLA dan *Sudan Armed Force* (SAF), yang kemudian meluas ke beberapa wilayah di Kordofan Selatan.<sup>65</sup> Konflik ini berasal dari ketidakpuasan terhadap penyelesaian isu keamanan yang diatur oleh CPA. Selain itu, penunjukan Ahmed Haroun sebagai gubernur juga memicu konflik, terutama mengingat kedua pria tersebut, baik Ahmed Haroun maupun Omar al-Bashir, menjadi tersangka yang diberikan oleh *International Criminal Court* (ICC) karena kekejaman yang diperbuat yang terjadi di Darfur.<sup>66</sup>

*Sudan Armed Force* (SAF) melakukan serangan udara dan menyerang pemukiman penduduk tanpa memperhatikan perbedaan antara warga sipil dan target militer, yang jelas melanggar hukum humaniter internasional. Mereka menggunakan pesawat tempur MIG, pembom Antonov, dan tembakan dari darat untuk melakukan aksi penyerangan ke kota serta kamp para pengungsi yang berada di Sudan Selatan.<sup>67</sup> Selain melakukan serangan bom dan tembakan ke permukiman, pasukan Sudan juga terlibat dalam tindakan pembakaran, penjarahan harta benda milik penduduk, penangkapan paksa, dan pelecehan terhadap wanita-wanita di desa yang mereka serang.<sup>68</sup>

Menurut laporan dari *Human Rights Watch*, sekitar 900.000 orang mengalami efek buruk dari adanya perang tersebut yang mengakibatkan para masyarakat terkena dampaknya seperti kehilangan tempat tinggal dan kekurangan

---

<sup>65</sup> Human Rights Watch, *Thirteenth Periodic Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights in the Sudan Preliminary*, vol. 11, 2011, <https://www.refworld.org/reference/countryrep/ohchr/2011/en/80579>.

<sup>66</sup> Human Rights Watch, *Sudan: Political Repression Intensifies*, Human Rights Watch, 2011, <https://www.hrw.org/news/2011/09/21/sudan-political-repression-intensifies>.

<sup>67</sup> Human Rights Watch, *Sudan: Crisis Conditions in Southern Kordofan*, Human Rights Watch, 2012, <https://www.hrw.org/news/2012/05/04/sudan-crisis-conditions-southern-kordofan>.

<sup>68</sup> Human Rights Watch, *Mass Rape in Darfur Sudanese Army Attacks against Civilians in Tabit*, 2015, [https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0215\\_web.pdf](https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/sudan0215_web.pdf).

makanan, akibat serangan tersebut. Sekitar 210.000 orang telah mengungsi ke Sudan Selatan dan Ethiopia. Setiap konflik selalu menghasilkan krisis kemanusiaan, termasuk di wilayah Kordofan Selatan dan Nil Biru. Penduduk lokal menghadapi masalah serius yang meliputi kekurangan air, makanan, dan akses layanan kesehatan yang memadai. Mereka juga terpaksa menjadi pengungsi di dalam negeri.<sup>69</sup>

Upaya yang bisa diambil untuk mengakhiri konflik bersenjata ini adalah dengan meratifikasi *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile*. Perjanjian tersebut mencakup berbagai ketentuan, salah satunya adalah negosiasi damai yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang ada.<sup>70</sup> Dalam hal ini, pemerintah Sudan tidak menghormati penandatanganan kesepakatan ini. Mereka mengirim pasukan militer untuk secara paksa melengserkan gubernur terpilih Nil Biru, Malik Agar, dan stafnya. Langkah ini dimaksudkan supaya menegaskan bahwa Sudan ingin mengontrol situasi dengan menerapkan hukum darurat dan memperluas konflik internal. Semua ini terkait dengan penghentian *Framework Agreement on Political and Security Arrangements for Southern Kordofan and Blue Nile*.

Selain konflik di Kordofan Selatan dan Nil Biru, pasukan Sudan juga menyerang kota Abyei, yang merupakan wilayah yang masih dipertentangkan antara Sudan dan Sudan Selatan, terutama karena kekayaan minyak yang ada di

---

<sup>69</sup>Human Rights Watch, *Op. Cit.*, hal. 6

<sup>70</sup> *Frame Agreement between Government of Sudan and Sudan Peoples Liberation Movement (North)*, (Addis Abba, Ethiopia: UN Peace Maker, 2011), [https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD\\_110628\\_AgreementPoliticalPartnershipNCPSPLMN.pdf](https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/SD_110628_AgreementPoliticalPartnershipNCPSPLMN.pdf).

sana. Industri perminyakan yang ada di Abyei ini memproduksi sekitar 76.600 barel per hari.<sup>71</sup> Sebelumnya, Abyei telah menggelar referendum mandiri untuk memutuskan apakah wilayah tersebut akan bergabung dengan Sudan atau Sudan Selatan, namun hasilnya tidak diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Hingga kini, Abyei belum dapat mengadakan referendum resmi karena belum ada keputusan final mengenai siapa yang memiliki hak suara.<sup>72</sup> Pada musim semi 2011, Sudan melancarkan serangan terhadap Abyei, menyebabkan kerusakan pada properti penduduk dan membuat 110.000 orang dari suku Ngok Dinka menjadi pengungsi tanpa tempat tinggal.<sup>73</sup> Pada akhirnya, Sudan menarik pasukannya dari wilayah Abyei dan digantikan oleh pasukan penjaga perdamaian dari Etiopia.

## **2.2 Keterlibatan Israel Dalam Konflik Antara Sudan dan Sudan Selatan**

Sudan, secara geografisnya merupakan negara yang berada di kawasan *Middle East and North Africa*, yang menganut konsep negara bangsa dan sering mengalami konflik, terletak di wilayah Lembah Sungai Nil. Secara geografis, Sudan adalah negara terluas di Afrika, mencakup sekitar seperempat luas Amerika Serikat. Negara ini kaya akan keberagaman budaya dan etnis, dan dikenal sebagai "Surah Mushagharah" karena kekayaan budaya dan keragaman etnisnya. Faktor-faktor ini telah menjadi pemicu konflik internal di Sudan.<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Rebecca Hamilton, 'Oil-Rich' Abyei: Time to Update the Shorthand for Sudan's Flashpoint Border Town?, Africa Monitor, 2010, <https://www.csmonitor.com/World/Africa/Africa-Monitor/2010/1102/Oil-rich-Abyei-Time-to-update-the-shorthand-for-Sudan-s-flashpoint-border-town>.

<sup>72</sup> Amanda Lucey, *The Referendum in Abyei Is an Ongoing Challenge for the African Union*, Institute for security studies, 2013, <https://issafrica.org/iss-today/the-referendum-in-abyei-is-an-ongoing-challenge-for-the-african-union>.

<sup>73</sup> Enough Project, *Tensions between the Two Sudans*, Enough Project, n.d., <http://www.enoughproject.org/conflicts/sudans/tensions-two-sudans>.

<sup>74</sup> Iyad Abd Al-Kareem, *The Israeli Role in Darfur Crisis*, Journal of the Center Palestine Studies, no. 16 (2012): 43–64, <https://iasj.net/iasj/article/64487>.

Secara harfiah, Sudan adalah wilayah yang dihuni oleh beberapa kelompok suku, adapun suku yang utama yaitu berasal dari Arab yang memegang sebagai kaum minoritas yang berasal dari kaum suku Saharan-Afrika. Walaupun jumlah lebih sedikit, kelompok etnis Arab memainkan peranannya dalam pembuatan perumusan kebijakan bagi pemerintah. Disisi wilayah yang berada di Utara, kaum ini seringkali mendapatkan keistimewaan dalam kehidupan sehari-harinya, Sementara wilayah selatan yang dihuni etnis kulit hitam yang umumnya tinggal di wilayah yang lebih kering berbanding terbalik jika yang didapatkan wilayah utara lebih subur. Tidak hanya itu, pasokan dana yang berasal dari sektor perminyakan yang ada di Selatan sering digunakan hanya untuk melakukan pengembangan yang ada di wilayah utara yang mengakibatkan adanya kesenjangan yang terlihat jelas dapat yang memicu konflik antara kedua kelompok etnis tersebut.<sup>75</sup>

Jika melihat konteks di atas yang menyebutkan Sudan sebagai negara yang rawan konflik, dapat dinyatakan bahwa Sudan memiliki sejarah konflik yang kompleks, terutama dengan Israel. Hubungan antara Sudan dan Israel telah ditandai dengan konflik, Konflik antara Israel dan Palestina hingga konflik internal di Sudan yang diduga melibatkan Israel dimulai dari Perang Enam Hari pada tahun 1967. Pada perang tersebut, negara-negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah, berperang melawan Israel. Mereka juga mendapat dukungan aktif dari negara-negara seperti Irak, Kuwait, Arab Saudi, Sudan, dan Aljazair.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Wahiduddin, *Konflik Sudan dan Jatuhnya Rezim Presiden Omar Bashir*, Nady Al-Adab 17, no. 1 (2020): 50–65, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/naa/article/view/10086>.

<sup>76</sup> history.Com Editors, *Six-Day War*, History, 2023, <https://www.history.com/topics/middle-east/six-day-war>.

Dalam konteks konflik domestik di Sudan, terutama konflik antar-etnis, sejarah mengatakan lahirnya gerakan separatisme di Sudan didukung penuh oleh Israel secara material. Dimulai dengan adanya konflik yang terjadi karena adanya pemberontakan terhadap Suku Anya-Nya kepada perpolitikan yang dijalankan oleh Sudan yang dimulai pada tahun 1956 hingga 1972. Konflik ini dapat terselesaikan dengan adanya perjanjian yang ditandatangani, perjanjian tersebut dinamai dengan *Addis Abba Agreement* yang ditandatangani pada tahun 1972, sekaligus isi perjanjian tersebut mengenai menetapkannya wilayah Sudan Selatan sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus tersendiri.<sup>77</sup>

Pada tahun 2003, konflik di Sudan kembali mencuat, namun kali ini gerakannya lebih terorganisir. Konflik ini berlangsung di Darfur, wilayah barat Sudan, di mana dua kelompok pemberontak, yang mengaku berafiliasi dengan *Sudan People's Liberation Movement (SPLM)* dan *Justice and Equality Movement (JEM)*, terlibat. Konflik di Darfur dipicu oleh aksi kelompok perlawanan yang menyerang pemerintah, dengan tuduhan bahwa pemerintah melakukan diskriminasi dan tindakan represif terhadap warga kulit hitam Afrika, sambil memberikan keistimewaan kepada warga Arab.<sup>78</sup> Darfur, yang artinya "tanah kaum Fur," telah lama menjadi wilayah yang menjadi pusat konflik pertempuran tanah antara tentara pemerintah dan milisi Arab yang dikenal sebagai Janjaweed.

---

<sup>77</sup> University of Central Arkansas, *Republic of the Sudan/Southern Sudan (1956-2011)*, University of Central Arkansas, 2024, <https://uca.edu/politicalscience/home/research-projects/dadm-project/sub-saharan-africa-region/71-republic-of-sudansouthern-sudan-1956-2011/>.

<sup>78</sup> Jérôme Tubiana, *Darfur: Between Two Wars*, ALJAZEERA, 2023, <https://www.aljazeera.com/features/longform/2023/6/30/between-two-wars-20-years-of-conflict-in-sudans-darfur>.

Meskipun demikian, pemerintah Sudan telah menyangkal segala tuduhan tersebut melibatkan dugaan bahwa mereka memberikan dukungan kepada milisi Janjaweed. Perang di Darfur telah memakan waktu yang cukup lama sekitar enam tahun, dari tahun 2003 hingga 2009.<sup>79</sup> Menurut PBB, sekitar 2,7 juta orang terpaksa mengungsi ke tenda-tenda pengungsian, sementara sekitar 300.000 jiwa lainnya gugur yang diakibatkan adanya konflik bersenjata ini, selain kematian kelaparan dan penyakit melanda bagi para pengungsi tersebut selama konflik berlangsung

Pada tahun 2008, mantan Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel, Avi Dichter, mengatakan Sudan merupakan negara yang dapat menjadi potensial bagi Israel dan dapat mengancam stabilitas perpolitikan yang ada di Israel. Sudan telah memberikan dukungan kepada kemerdekaan Palestina serta menolong Mesir pada saat konflik melawan pihak zionis tersebut. Oleh karena itu, Israel telah melakukan cara – cara untuk dapat menjatuhkan Sudan, salah satu caranya dengan memberikan dukungan kepada gerakan pemberontak.<sup>80</sup> Menurut Joseph Lago, pemimpin organisasi gerilya Anya-Nya (*Viper Venom*) di Sudan Selatan, Sudan Selatan meminta bantuan dari Israel untuk memblok para tentara milisi Sudan untuk dapat masuk kedalam tentara Mesir dengan cara mengurangi intensitas konflik yang sedang terjadi dengan pejuang Sudan Selatan. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi Israel.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Noor Al-bazzaz, *Sudan's President Denies Involvement in Darfur Atrocities*, the guardian, n.d., <https://www.theguardian.com/world/2008/aug/20/sudan>.

<sup>80</sup> Fahmi Howeidi, *Israelis Can Tell the Whole Story of Sudan's Division - They Wrote the Script and Trained the Actors*, Middle East Monitor, 2014, <https://www.middleeastmonitor.com/20140125-israelis-can-tell-the-whole-story-of-sudans-division-they-wrote-the-script-and-trained-the-actors/>.

<sup>81</sup> Koren, *South Sudan and Israel: A Love Affair in a Changing Region?*, Dayan, 2019, <https://dayan.org/content/south-sudan-and-israel-love-affair-changing-region>.

Konflik di Darfur dipengaruhi oleh peran Israel, Menurut pernyataan Avi Dichter, Menteri Keamanan Dalam Negeri Israel pada tahun 2012, Israel memiliki tiga pandangan utama dalam kerangka ekspansinya, hal ini menjadikan bukti kuat bahwasanya Israel terbukti melibatkan diri kepada konflik yang ada di Sudan terutama dalam konflik Darfur. Prinsip-prinsip tersebut mencakup melibatkan sektor militer untuk dapat mengurangi segala bentuk tantangan yang tergolong sulit diselesaikan apabila tanpa campur tangan militer, memanfaatkan para kelompok suku yang ditaruh ke dalam kekuasaan yang condong kepada oposisi yang digunakan untuk mendukung bentuk aspirasi mereka dalam berkuasa, serta menggabungkan aliansi yang berasal dari angkatan laut dari negara negara tetangga. Prinsip ini sudah lama direncanakan oleh David Ben-Gurion pada tahun 1950 rancangan prinsip ini melibatkan negara Turki dan Iran.<sup>82</sup>

Dilihat dari perspektif lain, para peneliti menemukan bahwa keterlibatan Israel dalam konflik Darfur tidak hanya melibatkan tiga prinsip utama yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, Israel memerintahkan para tentara militernya untuk turut andil menjadi sebuah pemimpin serta Israel juga meminta kepada tentaranya untuk dapat melatih para kelompok oposisi, seperti yang dilakukan dengan penunjukan John Frank sebagai Komandan Gerakan Pembebasan Sudan Selatan. Selain itu, Israel juga memberikan dukungan senjata dan bantuan keuangan kepada SPLM/A.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> Ulum, *Pro-Kontra Normalisasi Hubungan Diplomatik Israel- Sudan: Antara Kepentingan Nasional Dengan Solidaritas Pembebasan Palestina*.

Pemerintah Sudan secara jelas mengklaim Israel ikut campur dalam pemberian senjata untuk para kelompok pemberontak. Sudan juga menjadi target serangan media sosial yang menggambarkan negara itu sebagai pusat "Islam Puritan", dengan menyoroti pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas. Akibat tuduhan pelanggaran HAM ini, Amerika Serikat memperketat embargo ekonomi terhadap Sudan dan menempatkannya dalam daftar negara pendukung terorisme. Antara tahun 2008 dan 2009, Mahkamah Internasional mengeluarkan pesan perintah penahanan terhadap Presiden Omar Al-Bashir atas tuduhan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, dan genosida. Namun, pemerintah Sudan menolak secara langsung untuk mengakui keabsahan tuntutan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.<sup>84</sup>

### **2.3 Kronologi Pembukaan Hubungan Diplomatik Sudan dengan Israel**

Pada 3 Februari 2020, Jenderal Abdul al-Fattah al-Burhan, pemimpin Militer Sudan, serta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertemu di Uganda untuk merencanakan beberapa kepentingan serta langkah Sudan dalam mengusahakan beberapa kepentingan dalam bentuk ekonomi dan pertahanan. Pertemuan ini merupakan langkah lanjutan dari skema serta mencari solusi mengenai hal dalam pembukaan hubungan baik atas dasar pembukaan Sudan dan Israel. Selain Israel dan Sudan, AS juga terlibat dalam upaya untuk memfasilitasi pembukaan hubungan diplomatik di antara keduanya.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> AP News, *A Timeline of Key Events in Rule of Sudan's Al-Bashir*, AP News, 2019, <https://apnews.com/general-news-1e66f573e9e34ebba48a56a9c3811241>.

<sup>85</sup> Yasir Zaidan, *The Sudan-Israel Normalization Process: A Tactical Move but a Strategic Hazard*, Stroum Center For Jewish Studies, 2021, <https://jewishstudies.washington.edu/israel-hebrew/sudan-israel-normalization-diplomatic-relations-netanyahu-al-burhan/>.

Pada pertemuan kedua pada 25 Agustus 2020, pertemuan ini melibatkan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dan Presiden transisi Sudan Abdul Fattah al-Burhan serta Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok di Khartoum. Dalam pertemuan ini Mike Pompeo mendorong mengenai potensi yang bisa didapatkan oleh Sudan atas pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel. Dalam pembicaraan antara Amerika Serikat dan Sudan, Amerika Serikat menyampaikan dorongan hubungan Sudan dan Israel dan dukungan Amerika Serikat atas proses pembukaan diplomatik ini.

Namun, usulan yang diajukan oleh Mike Pompeo pada saat itu belum dapat diwujudkan. Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, menyatakan bahwa pemerintahan transisi Sudan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah arah politik negara. Akibatnya, pertemuan kedua ini tidak menghasilkan perubahan signifikan menuju pembukaan hubungan diplomatik antara Sudan dan Israel.

Pertemuan terakhir yang disebut sebagai "*final push*", melibatkan Israel, Sudan, dan Amerika Serikat, berlangsung pada 22 Oktober 2020 di Khartoum. Pertemuan ini melibatkan delegasi antara ketiga negara, di dalam pertemuan tersebut Abdalla Handok pada prinsipnya telah setuju untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan cakupan tidak terburu-buru dengan syarat langkah ratifikasi akan dilakukan oleh negara yang masih belum ada parlemen transisi. Israel dan Amerika datang untuk menyelesaikan pada kesepakatan yang membangun hubungan dengan Israel.

Hal ini didukung oleh statment penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brein "saya pikir kami akan segera mengumumkan beberapa hal mengenai hal itu". Atas pembukaan hubungan diplomatik ini, menyatakan kesepakatan yang ada akan berdampak kepada bantuan dan investasi dari Israel, dan terkhususnya bidang teknologi dan pertanian. Amerika Serikat dan Israel juga memberikan janji kepada Sudan atas bantuan negara sekutunya akan memberikan investasi dan keringan hutang Sudan. Dalam perjanjian ini juga ditekankan imbalan langsung kepada Sudan mengenai penghapusan negara Sudan dari daftar negara terorisme yang telah dicap oleh Amerika Serikat sejak 1993.

Pada 23 Oktober 2020, Amerika Serikat secara resmi mengumumkan bahwasanya negara Sudan merupakan negara selanjutnya yang akan bergabung kedalam perjanjian yang di mediasi oleh Amerika Serikat dan dilaksanakan oleh Israel yang bernama *Abraham Accords*.<sup>86</sup> Israel dan Sudan telah mencapai kesepakatan untuk mengubah dinamika hubungan mereka, dengan Amerika Serikat sebagai mediator. Langkah ini menandai titik penting dalam diplomasi regional, dengan harapan bahwa pembukaan babak baru dalam kerjasama mereka akan menghasilkan manfaat ekonomi dan keamanan yang signifikan serta meningkatkan stabilitas di Timur Tengah.<sup>87</sup>

Untuk mempermudah memahami mengenai alur daripada pembukaan hubungan diplomatik Sudan dan Israel, maka dapat dipaparkan melalui alur berikut:

---

<sup>86</sup> Oval, *Remarks by President Trump Announcing Normalization of Relations Between Sudan and Israel*, Trump White House, 2020, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-announcing-normalization-relations-sudan-israel/>.

<sup>87</sup> Steve Holland, "Israel, Sudan Agree to Normalize Ties with U.S. Help: Joint Statement," Reuters, 2020, <https://www.reuters.com/article/idUSKBN27827S/>.

## Bagan 2.1 Bagan Alur Kronologi Pembukaan Diplomatik Sudan dan Israel

Tahun 2020

